

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DAWARBLANDONG
TAHUN 2021**


KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun Anggaran 2021. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021
CAMAT DAWARBLANDONG



NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.
Pembina
NIP. 19810207 200501 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2021.....	5
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	5
BAB IV Penutup	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Dawarblandong merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPD) Tahun 2021 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Dawarblandong yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perubahan Kecamatan Dawarblandong adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Tahun 2016 – 2021.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong yang berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Dawarblandong.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Mojokerto;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil
4. Langkah-langkah / kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan perubahan Renja OPD, proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Perubahan, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RPAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah triwulan II tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dawarblandong sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dikatakan sudah cukup bagus dan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dengan realisasi anggaran mencapai 38,86%, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan II disajikan dalam tabel sebagai berikut :

FORMULIR E.81 (DAWAR) Periode 2021
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Mojokerto
Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
Periode Pelaksanaan Triwulan I, II, dan III

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit PD (Penanggung Jawab)	
				K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
1	DAWAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	0	0	0	0	0	3.401.412.779	-	495.696.668	-	846.353.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
1.1	DAWAR	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	0	0	0	0	0	2.000.000	-	218.900	-	-	-	-	-	-	218.900	-	218.900	-	-	DAWAR
1.1.1	DAWAR	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	0	0	0	0	0	1.000.000	-	218.900	-	-	-	-	-	-	218.900	-	218.900	-	21.890.000	DAWAR
1.1.2	DAWAR	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0	0	0	0	0	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
1.2	DAWAR	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN	0	0	0	0	0	3.101.449.185	-	436.812.191	-	747.947.232	-	-	-	-	1.184.759.423	-	1.184.759.423	-	-	DAWAR
1.2.1	DAWAR	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayar	0	0	0	0	0	3.091.449.185	-	436.812.191	-	747.947.232	-	-	-	-	1.184.759.423	-	1.184.759.423	-	118.475.942.300	DAWAR
1.2.2	DAWAR	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan kinerja	0	0	0	0	0	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
1.3	DAWAR	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	0	0	0	0	0	76.800.960	-	14.985.577	-	14.530.747	-	-	-	-	29.516.324	-	29.516.324	-	1.980.000.000	DAWAR
1.3.1	DAWAR	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,	0	0	0	0	0	35.400.960	-	5.085.577	-	4.630.747	-	-	-	-	9.716.324	-	9.716.324	-	971.632.400	DAWAR

			Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik																					
1.3.2	DAWAR		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja penyediaan jasa Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan selama 12 bulan	0	0	0	0	0	41.400.000	-	9.900.000	-	9.900.000	-	-	-	-	-	19.800.000	-	19.800.000	-	1.980.000.000	DAWAR
1.4	DAWAR		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	0	0	0	0	0	145.787.634	-	32.135.000	-	60.910.000	-	-	-	-	-	93.045.000	-	93.045.000	-	400.000.000	DAWAR
1.4.1	DAWAR		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang dapat tercukupi	0	0	0	0	0	16.787.634	-	1.500.000	-	2.700.000	-	-	-	-	-	4.200.000	-	4.200.000	-	420.000.000	DAWAR
1.4.2	DAWAR		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dapat tercukupi	0	0	0	0	0	10.000.000	-	2.125.000	-	2.580.000	-	-	-	-	-	4.705.000	-	4.705.000	-	470.500.000	DAWAR
1.4.3	DAWAR		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dapat tercukupi	0	0	0	0	0	5.000.000	-	1.100.000	-	3.500.000	-	-	-	-	-	4.600.000	-	4.600.000	-	460.000.000	DAWAR
1.4.4	DAWAR		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	0	0	0	0	0	95.000.000	-	22.210.000	-	43.580.000	-	-	-	-	-	65.790.000	-	65.790.000	-	6.579.000.000	DAWAR
1.4.5	DAWAR		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	15.000.000	-	3.300.000	-	6.450.000	-	-	-	-	-	9.750.000	-	9.750.000	-	975.000.000	DAWAR
1.4.6	DAWAR		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas luar daerah	0	0	0	0	0	4.000.000	-	1.900.000	-	2.100.000	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000	-	400.000.000	DAWAR
1.5	DAWAR		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0	0	64.175.000	-	11.545.000	-	11.950.000	-	-	-	-	-	23.495.000	-	23.495.000	-	540.000.000	DAWAR
1.5.1	DAWAR		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perizinan	0	0	0	0	0	37.000.000	-	10.595.000	-	7.500.000	-	-	-	-	-	18.095.000	-	18.095.000	-	1.809.500.000	DAWAR
1.5.2	DAWAR		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	0	0	0	0	0	27.175.000	-	950.000	-	4.450.000	-	-	-	-	-	5.400.000	-	5.400.000	-	540.000.000	DAWAR
1.6	DAWAR		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pakaian dinas pegawai (PNS/THL), serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	0	0	0	0	0	11.200.000	-	-	-	11.016.000	-	-	-	-	-	11.016.000	-	11.016.000	-	1.101.600.000	DAWAR

1.6.1	DAWAR		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas/sepatu/topi	0	0	0	0	0	11.200.000	-	-	-	11.016.000	-	-	-	-	11.016.000	11.016.000	-	1.101.600.000	DAWAR
2	DAWAR		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0	0	0	0	0	22.000.000	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
2.1	DAWAR		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen PATEN yang terlayani tepat waktu	0	0	0	0	0	22.000.000	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	1.900.000	1.900.000	-	190.000.000	DAWAR
2.1.1	DAWAR		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	0	0	0	0	0	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
2.1.2	DAWAR		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	0	0	0	0	0	17.000.000	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	1.900.000	1.900.000	-	190.000.000	DAWAR
3	DAWAR		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan	0	0	0	0	0	117.800.000	-	25.826.000	-	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
3.1	DAWAR		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0	0	0	0	117.800.000	-	25.826.000	-	2.250.000	-	-	-	-	28.076.000	28.076.000	-	1.115.000.000	DAWAR
3.1.1	DAWAR		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kegiatan pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	60.000.000	-	16.926.000	-	-	-	-	-	-	16.926.000	16.926.000	-	1.692.600.000	DAWAR
3.1.2	DAWAR		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	57.800.000	-	8.900.000	-	2.250.000	-	-	-	-	11.150.000	11.150.000	-	1.115.000.000	DAWAR
4	DAWAR		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketenteraman dan ketertiban umum	0	0	0	0	0	70.000.000	-	1.800.000	-	27.309.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
4.1	DAWAR		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	0	0	0	0	0	70.000.000	-	1.800.000	-	27.309.000	-	-	-	-	29.109.000	29.109.000	-	420.000.000	DAWAR

				Ketertiban Umum																				
4.1.1	DAWAR		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	0	0	0	0	40.000.000	-	-	-	24.909.000	-	-	-	-	24.909.000	-	24.909.000	-	2.490.900.000	DAWAR
4.1.2	DAWAR		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0	0	30.000.000	-	1.800.000	-	2.400.000	-	-	-	-	4.200.000	-	4.200.000	-	420.000.000	DAWAR
5	DAWAR	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun	0	0	0	0	0	83.000.000	-	600.000	-	21.189.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
5.1	DAWAR		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0	0	0	0	0	83.000.000	-	600.000	-	21.189.500	-	-	-	-	21.789.500	-	21.789.500	-	-	DAWAR
5.1.1	DAWAR		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	0	0	12.000.000	-	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000	-	600.000	-	60.000.000	DAWAR
5.1.2	DAWAR		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	25.500.000	-	-	-	12.590.000	-	-	-	-	12.590.000	-	12.590.000	-	1.259.000.000	DAWAR
5.1.3	DAWAR		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0	0	0	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
5.1.4	DAWAR		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0	0	12.000.000	-	-	-	8.599.500	-	-	-	-	8.599.500	-	8.599.500	-	859.950.000	DAWAR
5.1.5	DAWAR		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0	0	0	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAWAR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM (%)																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Rendah										

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM (%)	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM (%)	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM (%)	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM (%)	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 KECAMATAN DAWARBLANDONG

No. Urut	Kode Rekening Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	KONTRAK	REALISASI (Rp.)			SISA	PELAKSANA	PRESENTASE (%)	FISIK	Ket
			(Rp)	(Rp.)	S/D BLN LALU	BLN INI	S/D BLN INI	(Rp.)		KEU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>										
2	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00		218.900,00		218.900,00	781.100,00		0,00	0,00	
3	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00		0,00		0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
4												
5	7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>										
6	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.091.449.185,00		905.281.176,00	279.478.247,00	1.184.759.423,00	1.906.689.762,00		38,32%	38,32%	
7	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00		0,00		0,00	10.000.000,00				
8												
9	7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>										
10	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.200.000,00		11.016.000,00		11.016.000,00	184.000,00		98,36%	98,36%	
11												
12	7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>										
13	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00	400.000,00		92,00%	92,00%	
14	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.000.000,00		48.640.000,00	17.150.000,00	65.790.000,00	29.210.000,00		69,25%	69,25%	
15	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00		6.800.000,00	2.950.000,00	9.750.000,00	8.250.000,00		54,17%	54,17%	
16	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00		4.705.000,00		4.705.000,00	5.295.000,00		47,05%	47,05%	
17	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.000.000,00		3.300.000,00	900.000,00	4.200.000,00	12.800.000,00		24,71%	24,71%	

18	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00		80,00%	80,00%	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.400.960,00		8.257.221,00	1.459.103,00	9.716.324,00	25.684.636,00				
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.400.000,00		16.500.000,00	3.300.000,00	19.800.000,00	21.600.000,00				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.000.000,00		16.095.000,00	2.000.000,00	18.095.000,00	18.905.000,00		48,91%	48,91%	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.175.000,00		5.400.000,00		5.400.000,00	21.775.000,00		19,87%	19,87%	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000,00		0,00		0,00	5.000.000,00		0,00%	0,00%	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000,00		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	18.100.000,00		9,50%	9,50%	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	60.000.000,00		16.926.000,00		16.926.000,00	43.074.000,00		28,21%	28,21%	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00		9.350.000,00	1.800.000,00	11.150.000,00	63.850.000,00		14,87%	14,87%	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										

	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00		19.359.000,00	5.550.000,00	24.909.000,00	15.091.000,00		62,27%	62,27%	
	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30.000.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	25.800.000,00		14,00%	14,00%	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.000.000,00		600.000,00		600.000,00	11.400.000,00		5,00%	5,00%	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.500.000,00		3.300.000,00	9.290.000,00	12.590.000,00	12.910.000,00		49,37%	49,37%	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.500.000,00		0,00		0,00	8.500.000,00		0,00%	0,00%	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000,00		8.599.500,00		8.599.500,00	3.400.500,00		71,66%	71,66%	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.000.000,00		0,00		0,00	25.000.000,00		0,00%	0,00%	
		JUMLAH	3.718.625.145,00		1.097.147.797,00	325.777.350,00	1.422.925.147,00	2.295.699.998,00		38,26%	38,26%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Usulan Program Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Matrik Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2021 Prioritas Daerah Pada RKPD Kabupaten Mojokerto
Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2021		Pagu Indikatif			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	APBD Pergeseran /refocusing	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	7	8	9	10	11	12= 11-9
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	80%	80%	3.405.625.145	3.401.412.779	4.051.028.779	649.616.000
2	16	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100	100 %	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Yang dapat Tersusun Sesuai Ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	16 Dokumen	16 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
2	16	01	2,01	03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	16 Dokumen	16 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-

2	16	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	3.101.449.185	3.101.449.185	2.966.065.185	(135.384.000)
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat terbayar	12 Bulan	12 Bulan	3.091.449.185	3.091.449.185	2.956.065.185	(135.384.000)
2	16	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	15 Laporan	15 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
2	16	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	11.200.000	11.200.000	11.200.000	-
2	16	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	30 Stel	30 Stel	11.200.000	11.200.000	11.200.000	-
2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	100%	150.000.000	145.787.634	295.787.634	150.000.000
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dapat tercukupi	1 paket	1 paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	1 paket	1 paket	95.000.000	95.000.000	245.000.000	150.000.000

2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	1 paket	1 paket	18.000.000	15.000.000	15.000.000	-
2	16	01	2,06	04	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan				
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dapat tercukupi	1 paket	1 paket				-
2	16	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang dapat tercukupi	12 Bulan	12 Bulan	17.000.000	16.787.634	16.787.634	-
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	4.000.000	4.000.000	-
2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat terpenuhi	100%	100%	0	0	635.000.000	635.000.000
2	16	01	2,09	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dapat terpenuhi	0 unit	20 unit			635.000.000	635.000.000

2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	76.800.960	76.800.960	76.800.960	-
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	35.400.960	35.400.960	35.400.960	-
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 thl	3 thl	41.400.000	41.400.000	41.400.000	-
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	64.175.000	64.175.000	64.175.000	-
2	16	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perizinan	2 unit	2 unit	37.000.000	37.000.000	37.000.000	-
2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-

2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12 Bulan	12 Bulan	27.175.000	27.175.000	27.175.000	-
2	16	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%	80%	25.000.000	22.000.000	22.000.000	-
2	16	02	2,01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen PATEN yang terlayani tepat waktu	500 dokumen	500 dokumen	25.000.000	22.000.000	22.000.000	-
2	16	02	2,01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	50 dokumen	50 dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-

2	16	02	2,01	05	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	450 dokumen	450 dokumen	20.000.000	17.000.000	17.000.000	-
2	16	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan	80%	80%	135.000.000	117.800.000	117.800.000	0
2	16	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15 kegiatani	15 kegiatani	135.000.000	117.800.000	117.800.000	0
2	16	03	2,01	03	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kegiatan pemberdayaan masyarakat	10 Kegiatan	10 Kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-

2	16	03	2,02	01	Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaanmasyarakat	5 Pembinaan	5 Pembinaan	75.000.000	57.800.000	57.800.000	-
2	20	02			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum	80%	80%	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0
2	20	02	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 Kegiatan	11 Kegiatan	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0
2	20	02	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-
2	20	02	2,01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
2	21	02			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun	80%	80%	83.000.000	83.000.000	83.000.000	0

2	21	02	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	79 fasilitasi	79 fasilitasi	83.000.000	83.000.000	83.000.000	0
2	21	02	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Fasilitasi	7 Fasilitasi	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
2	21	02	2,01	03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Fasilitasi / Desa	18 Fasilitasi / Desa	25.500.000	25.500.000	25.500.000	-
2	21	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	umlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Fasilitasi / Desa	18 Fasilitasi / Desa	8.500.000	8.500.000	8.500.000	-
2	21	02	2,02	01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 Desa	18 Desa	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
2	21	02	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18 Desa	18 Desa	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Tahun 2021 Kecamatan Dawarblandong merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Dawarblandong selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2021, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKAP). Dalam rangka hal tersebut Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Perubahan Kecamatan Dawarblandong ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Mojokerto, Juni 2021
CAMAT DAWARBLANDONG



NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.
Pembina
NIP. 19810207 200501 1 006

